

BAB 2

SEJARAH HUBUNGAN ASEAN DENGAN CHINA-INDIA

Bab ini merupakan sebuah tinjauan historis terhadap hubungan ASEAN dengan China-India. Bagian pertama dan kedua dari bab ini akan melihat sejarah hubungan ASEAN dengan China-India yang dimulai dari terbentuknya ASEAN pada tahun 1967, dan dalam bagian ini juga akan dipaparkan mengenai kepentingan kedua negara ini terhadap ASEAN. Bagian ketiga akan membahas tentang posisi China-India dikawasan Asia Tenggara. Tujuan dari bab ini adalah memberikan gambaran bagaimana proses perkembangan hubungan ASEAN dengan China-India, sehingga kedua negara ini memiliki peranan yang sangat penting bagi kawasan Asia Tenggara khususnya bagi ASEAN.

2.1 Sejarah Hubungan Asean Dengan China

Hubungan antara China dan Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan negara-negara anggotanya telah mengalami perubahan yang signifikan selama 15 tahun terakhir. Ketika Beijing pertama kali membentuk kontak resmi dengan anggota asli-6 ASEAN pada tahun 1991, hubungan diplomatik dengan Indonesia susah untuk diperbaiki, namun China mulai menormalkan hubungan dengan Vietnam, dan hanya menjalin hubungan diplomatik dengan Singapura. Ada kecurigaan yang kuat, serta kekhawatiran, diantara negara-negara anggota ASEAN atas meningkatnya kekuatan China dan niatnya ke Asia Tenggara. Berdasarkan sejarah, Beijing meng-klaim kedaulatan atas Kepulauan Spratly di Laut China Selatan, mengerahkan dan sesekali menggunakan kekuatan militernya untuk menegaskan klaim teritorial (dengan Vietnam Selatan pada tahun 1974, dan dengan Vietnam pada tahun 1988), membayangi negara-negara Asia Tenggara pada saat ketidakpastian komitmen AS yang melakukan penarikan militer di wilayah itu (misalnya, dengan ditutupnya pangkalan militer Subic dan Clark di Filipina pada tahun 1991). Secara eksternal

maupun internal strategi penyeimbangan ASEAN di awal 1990-an sangat banyak didorong oleh penilaian suram tersebut.

2.1.1 Perubahan Hubungan ASEAN Dengan China: Dari Permusuhan Menuju Pertemanan

Sejarah China dengan tetangganya Asia Tenggara selama terjadinya Perang Dingin adalah salah satu bentuk baik persahabatan dan permusuhan. Indonesia (April 1950) dan Burma (Juni 1950) adalah di antara beberapa negara yang pertama kali mengakui Republik Rakyat China (RRC). Dari awal 1950-an sampai pertengahan tahun 1960-an, Beijing menikmati kehangatan hubungan terutama dengan Jakarta, yang paling menonjol adalah ketika Konferensi Negara Asia Afrika di Bandung tahun 1955 dan berlanjut semasa pemerintahan Presiden Sukarno. Beijing juga mempertahankan hubungan dekat dengan rezim komunis di Vietnam Utara dan memberikan dukungan yang signifikan atas perlawanan mereka terhadap Perancis dan Amerika Serikat dari tahun 1950 hingga 1970-an, yaitu berupa bantuan secara material yang cukup besar dan bantuan tenaga manusia.¹

Tapi hubungan China dengan negara-negara Asia Tenggara non-komunis banyak yang tidak harmonis. Kekhawatiran atas potensi ancaman dari komunisme membuat beberapa dari mereka untuk berpartisipasi membentuk aliansi seperti organisasi regional (Southeast Asian Treaty Organization atau SEATO, 1954-1977; the Five-Power Defense Arrangements atau FPDA, 1971-) dengan kekuatan eksternal-Amerika Serikat khususnya-untuk melindungi kepentingan mereka. Ada kecurigaan mendalam atas motif dan kegiatan China, terutama karena mereka banyak berhubungan dengan masyarakat luar negeri China di negara-negara tersebut.² Dukungan publik Beijing terhadap pemberontak komunis

¹ Joyce K. Kallgren, Noordin Sopiee, and Soedjati Djiwandono, eds., *ASEAN and China: An Evolving Relationship*, Berkeley, California: Institute of East Asian Studies, University of California at Berkeley, 1988.

² Leo Suryadinata, *China and the ASEAN States: The Ethnic Chinese Dimension*, Singapore: Singapore University Press, 1985.

di kawasan hanya memperkuat persepsi dan ketakutan mereka. Tidak mengherankan, banyak dari mereka tidak mau membangun hubungan diplomatik dengan Beijing sampai pertengahan tahun 1970-an (Thailand, Malaysia, dan Filipina), dan beberapa negara hanya menormalisasi hubungan dengan China pada 1990-an (Singapura dan Indonesia).³

Pemulihan hubungan Sino-Amerika di awal 1970-an menyebabkan pembentukan hubungan diplomatik antara China dan beberapa negara ASEAN. Kerjasama China-ASEAN muncul di akhir 1970-an, ironisnya sebagian besar didorong oleh keprihatinan bersama mereka atas keinginan Vietnam yang berusaha untuk mendirikan hegemoni di Indo-China, khususnya setelah invasi ke tetangga Kamboja. Thailand, yang berada di garis depan konflik Kamboja, berusaha mengembangkan hubungan keamanan dengan China. China juga berkoordinasi dengan ASEAN dalam mencari penyelesaian masalah politik Kamboja dan nantinya didukung oleh posisi pemerintah koalisi Kamboja yang dipimpin oleh Pangeran Sihanouk (bukan Hanoi-didukung rezim Heng Samrin) untuk mewakili Phnom Penh di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).⁴

Selama tahun 1980-an, kebijakan China ke Asia Tenggara mulai mengalami perubahan penting dalam dua hal. Beijing mulai menempatkan hubungan negara ke negara dalam ikatan hubungan ideologis dengan cara menghentikan dukungannya terhadap gerakan pemberontakan komunis di kawasan. Pada tahun 1989, juga mengeluarkan undang-undang tentang kewarganegaraan China terhadap warga negaranya yang tinggal diluar negeri yang butuh pengadopsian kewarganegaraan. Dengan mengambil dua langkah penting ini membuat hubungan bilateral China dengan sejumlah negara Asia Tenggara mulai membaik.

³ Reuben Mondejar and Wai Lung Chu, "ASEAN-China Relations: Legacies and Future Directions," in Ho Khai Leong and Samuel C. Y. Ku, eds., *China and Southeast Asia: Global Changes and Regional Challenges*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2005, hal, 211-227.

⁴ Alice D. Ba, "China and ASEAN: Renavigating Relations for a 21st Century Asia," *Asian Survey*, Vol. 43, No. 4, September/October 2003, hal, 622-647; Wang Gungwu, "China and Southeast Asia: Changes in Strategic Perceptions," in Leong and Ku, eds., *China and Southeast Asia*, hal, 3-14.

Beijing tampak ingin membina hubungan yang lebih baik dengan tetangga Selatan, dan ini telah membuka jalan bagi perbaikan hubungan politik.⁵

Kontak resmi Beijing dengan ASEAN sebagai kelompok dimulai pada bulan Juli 1991 ketika Menteri Luar Negeri China Qian Qichen diundang untuk menghadiri upacara pembukaan Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-24. Sejak saat itu China secara berurutan terus menghadiri Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN. Pada tahun 1994, China berpartisipasi dalam Forum Regional ASEAN (ARF) dan menjadi mitra dialog konsultatif ASEAN. Status ini meningkat pada tahun 1996, ketika China menjadi mitra dialog penuh dengan ASEAN. Pada bulan Desember 1997, Presiden China Jiang Zemin dan pemimpin ASEAN mengadakan pertemuan puncak pertama mereka di Malaysia dan mengeluarkan pernyataan bersama mengumumkan keputusan mereka untuk membangun hubungan kemitraan yang lebih baik dan sikap saling percaya antara China dan ASEAN yang berorientasi pada abad ke-21. Pada bulan Oktober 2003, China dan ASEAN menandatangani "Deklarasi Bersama RRC dan Pemimpin Negara ASEAN-Kemitraan Strategis untuk Perdamaian dan Kesejahteraan."⁶

Perkembangan utama dalam hubungan ASEAN-China sejak berakhirnya Perang Dingin mungkin disebabkan karena saling ketergantungan ekonomi yang tumbuh di antara keduanya. Bahkan, perdagangan dua arah telah berkembang pada tingkat 20 persen selama sepuluh tahun terakhir dan mencapai lebih dari US \$ 100 miliar pada tahun 2004, mencapai target satu tahun lebih cepat dari yang diperkirakan. Pada tahun 2005, tercatat peningkatan sebesar 23%, mencapai US \$ 130.4 milyar.⁷ Negara anggota ASEAN memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi China yang spektakuler sebagai raksasa Asia dan juga menghasilkan manfaat ekonomi bagi kawasan secara keseluruhan. Sebagai contoh, pada tahun

⁵ N. Ganesan, "ASEAN's Relations with Major External Powers," *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 22, No. 2, August 2000, hal, 264.

⁶ Wang Gungwu, "China and Southeast Asia: The Context of a New Beginning," in David Shambaugh, ed., *Power Shift: China and Asia's New Dynamics*, Berkeley, CA: University of California Press, 2005, hal, 187-204

⁷ Xinhua, "China-ASEAN Trade Soaring," January 17, 2006, english.sina.com/business/1/2006/0117/62228.html.

2004, ASEAN mencapai perdagangan yang surplus sebesar US \$ 20 miliar dengan China, sementara mitra dagang utama China lainnya memiliki defisit yang cukup besar.⁸

Para analis China telah membagi evolusi hubungan ekonomi ASEAN-China menjadi dua tahap. Yang pertama, dari tahun 1991, ketika Menteri Luar Negeri China Qian Qichen diundang untuk menghadiri Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-24, untuk tahun 2001 ketika Presiden China Zhu Rongji mengusulkan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China, melihat kedua belah pihak memperluas dan memperdalam hubungan perdagangan bilateral. Tahap kedua dimulai pada bulan November 2002, dengan penandatanganan *Agreement on Comprehensive Economic Cooperation* China-ASEAN menuju integrasi ekonomi regional. Selama bertahun-tahun, China dan ASEAN telah melembagakan 48 mekanisme reguler untuk memfasilitasi kerjasama ekonomi yang lebih erat. Yang paling terkemuka antara mereka adalah mekanisme politik ASEAN+1, yang diluncurkan pada tahun 1997. Selain itu, ada lima kelompok kerja: Pertemuan Pejabat Senior China-ASEAN, Komite Kerjasama Bersama China-ASEAN, Komite Kerjasama Bersama Ekonomi dan Perdagangan ASEAN-China, Komite Bersama Sains dan Teknologi ASEAN-China (Juli 1994), dan Komite Beijing-ASEAN. Kedua belah pihak juga telah mengidentifikasi lima bidang utama kerjasama; pertanian, teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan sumber daya manusia, Pembangunan Sungai Mekong, dan investasi bersama.⁹

Pada KTT ASEAN ke-delapan di Phnom Penh, Kamboja, pada bulan November 2002, China dan ASEAN menandatangani *the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation*. Jika hal ini diimplementasikan, akan merupakan pasar umum bagi 1,7 miliar orang, dengan produk domestik bruto gabungan (PDB) sebesar US \$ 1,5-2 milyar. Kedua belah pihak berusaha

⁸ Wayne Arnold, "China Rise Not Doom for Others," International Herald Tribune, February 28, 2006. www.iht.com/articles/2006/02/28/business/asiaecon.php.

⁹ Zhang Haibing, "Zhongguo-dongmeng quyu jingji hezuo de xinjinzhan yu wenti" ["Progress and Problems in China-ASEAN Regional Economic Cooperation"], Guoji wenti luntan [International Review], No. 38, Spring 2005. www.sis.org.cn/gjwlt/2005/zhanghaibin.htm.

membangun kawasan perdagangan bebas (FTA) dalam waktu 10 tahun, pertama dengan ASEAN asli-6 pada tahun 2010, diikuti oleh seluruh ASEAN-10 pada tahun 2015.¹⁰ Inisiatif sebagian besar berasal dari China, seperti diakui bahwa selama ini negara anggota ASEAN merasa khawatir terhadap pertumbuhan ekonomi China, efek *crowding-out* arus investasi ke Asia Tenggara dan peningkatan persaingan ekonomi. Setelah Perdana Menteri Zhu mengusulkan ide FTA, an ASEAN-China Expert Group on Economic Cooperation didirikan untuk menindaklanjuti proposal Zhu, serta dampak dari bergabungnya China kedalam World Trade Organization (WTO) pada tahun 2001. Hal ini juga merupakan respon terhadap krisis keuangan Asia 1997 dan oleh karena itu perlunya pendekatan yang lebih regional untuk menghadapi tantangan ekonomi di masa depan. Kerjasama juga meliputi proyek pembangunan Sungai Mekong Basin yang telah didukung oleh Asian Development Bank dan disahkan oleh ASEAN senilai US \$ 2,5 miliar untuk pembangunan jalur kereta api Trans-Asia Kunming dan Singapura.¹¹

Meskipun ada banyak alasan untuk melakukan integrasi ekonomi yang lebih besar, beberapa analis menunjukkan alasan strategis untuk mengembangkan FTA, terutama dari perspektif China. Untuk memulai, dalam menanggapi kemajuan ekonomi China yang terus meningkat, suatu perjanjian dapat dirancang guna menciptakan lingkungan keamanan kawasan yang damai. Kedua, untuk menanggapi kekhawatiran yang muncul di kawasan terhadap tumbuhnya kekuatan China adalah dengan cara mengintegrasikan diri dengan ASEAN, sehingga meminimalkan potensi konflik. Analis China menyarankan bahwa CAFTA harus dilihat dari perspektif strategis dan bagian dari penciptaan perdamaian. Geo-ekonomi dan interaksi ekonomi yang lebih luas dengan ASEAN

¹⁰ John Wong and Sarah Chan, "China-ASEAN Free Trade Agreement: Shaping Future Economic Relations," *Asian Survey*, Vol. 43, No. 3, May/June 2003, hal. 507-526; Thitapha Wattanapruttipaisan, "ASEAN-China Free Trade Area: Advantages, Challenges, and Implications for the Newer ASEAN Member Countries," *ASEAN Economic Bulletin*, Vol. 20, No. 1, April 2003, hal. 31-38; James Laurenceson, "Economic Integration between China and the ASEAN-5," *ASEAN Economic Bulletin*, Vol. 20, No. 2, August 2003, hal. 103-111.

¹¹ Joseph Yu-Shek Cheng, "The ASEAN-China Free Trade Area: Genesis and Implications," *Australian Journal of International Affairs*, Vol. 58, No. 2, June 2004, hal. 257-277.

akan mendukung tujuan-tujuan ini. Untuk mendahului strategi Taiwan yang melirik ke Asia Tenggara, China harus memberikan perhatian yang lebih besar bagi pengembangan wilayah barat daya (Yunnan dan Guangxi khususnya) untuk mengembangkan dan memperkuat hubungan ekonomi dengan negara-negara ASEAN.¹²

Ketiga, dengan mengambil peran utama dalam membentuk FTA, China juga berharap untuk dapat memainkan peran yang lebih menonjol sebagai pusat kawasan pertumbuhan ekonomi. Keempat, dengan berinvestasi lebih banyak di kawasan dan penerapan "Early Harvest Program," dapat memberikan perlakuan istimewa pada produk pertanian negara-negara Asean dalam hal penurunan tarif dan akses pasar- Beijing berupaya untuk mengatasi anggapan "ancaman China," tidak di area keamanan, tetapi dalam konteks persaingan ekonomi. Dan akhirnya, dengan memasukkan pengaturan perdagangan bebas berbasis-aturan, China juga ingin menunjukkan sikap penerimaan atas multilateralisme, menghormati norma-norma dan aturan. Untuk beberapa alasan negara anggota ASEAN berusaha untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi China yang dinamis, setidaknya tidak sampai tertinggal. Sebuah FTA juga dapat mendorong kekuatan eksternal lainnya untuk membuat pola kesepakatan yang sama, sehingga membuka lebih banyak peluang di bidang perdagangan dan investasi asing langsung (FDI).¹³

Sementara itu, perdagangan China-ASEAN tercatat mengalami pertumbuhan yang pesat selama dekade terakhir, keduanya menempati peringkat kelima sebagai mitra dagang, setelah intra-ASEAN, Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa (UE). Perkembangan di masa depan akan tergantung pada bagaimana keduanya bisa melengkapi, tidak saling bersaing di sektor manufaktur tenaga kerja intensif dan saling meningkatkan nilai investasi. Negara-negara ASEAN melihat peluang dari kemajuan China, tetapi mereka juga khawatir atas dampak

¹² Qiu Danyang, "Zhongguo-dongmeng ziyu maoyiqu: zhongguo heping jueqi de diyuan jingjixue sikao" ["China-ASEAN FTA: On the Geo-Economics of China's Peaceful Rise"], *Dangdai yatai* [Contemporary Asia-Pacific Studies], No. 1, January 2005, hal. 8-13.

¹³ Sheng Lijun, "China-ASEAN Free Trade Area: Origins, Developments and Strategic Motivations," ISEAS Working Paper: International Politics & Security Issues Series No. 1, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2003

jangka panjang kekuatan China dalam bersaing untuk mendapatkan investasi asing langsung, menggantikan mereka sebagai produsen produk tenaga kerja intensif dan sebagai basis manufaktur. Hal ini akan menyebabkan kemerosotan ekonomi yang parah di negara-negara ASEAN jika kurang mampu dalam bersaing dan melakukan penyesuaian.¹⁴

The CAFTA telah menghasilkan banyak minat pada kekuatan ekstra-regional lain yang menjalin hubungan FTA dengan ASEAN. Dengan CAFTA, ASEAN +1, dan forum regional lainnya, termasuk Pertemuan Asia Timur pada Desember 2005, mengidentifikasi bahwa trend dari perkembangan regionalisme menuju pasar bersama, menumbuhkan saling ketergantungan ekonomi, dan bahkan berbagi ide tentang arsitektur keamanan regional yang harus dibentuk.¹⁵

Hubungan China-ASEAN telah berevolusi dari permusuhan dan kecurigaan untuk persahabatan dan kerjasama yang lebih besar pada berbagai isu. Setelah membangun suatu kemitraan strategis perdamaian dan kemakmuran, kerjasama kedua belah pihak mengarah pada hubungan yang stabil, dalam jangka waktu yang lama untuk masa depan. Selain keamanan antar kedua negara, jalinan hubungan ekonomi telah dimulai sejak reformasi pada akhir 1970-an, Partai Komunis China (PKC) telah berusaha untuk membangun dan memperluas hubungan dengan partai politik di Asia Tenggara. Saat ini, PKC memiliki hubungan resmi dengan 39 partai politik di kawasan, dengan alasan dan tujuannya adalah untuk mempromosikan saling pengertian, pembelajaran, keberhasilan ekonomi, dan pemerintahan (terlepas dari ideologi). Perkembangan ini jauh dari tahun 1960-an dan 1970-an ketika PKC

¹⁴ Mari Pangestu, "China's Economic Rise and the Responses of ASEAN," in Kokubun Ryosei and Wang Jisi, eds., *The Rise of China and a Changing East Asian Order*, Tokyo and New York: Japan Center for International Exchange, 2004, hal. 241-263.

¹⁵ Mark Beeson, "ASEAN Plus Three and the Rise of Reactionary Regionalism," *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 25, No. 2, August 2003, hal. 251-268

mendukung pergerakan partai-partai komunis sebagai bagian dari strategi gerakan revolusi di kawasan untuk menggulingkan pemerintah yang berkuasa.¹⁶

Upaya Beijing untuk meyakinkan tetangga melalui yang disebut diplomasi baru telah berhasil mengembalikan kepercayaan dari tetangga Asia Tenggara, tapi hal itu tidak sepenuhnya menghapus perselisihan di antara mereka. Krisis keuangan Asian tahun 1997 adalah titik balik. China memberikan respon terhadap krisis, termasuk janji memberikan bantuan sebesar US \$ 1 milyar untuk membantu Thailand dan tidak menedevaluasi Renminbi, yang mana sangat membantu negara-negara ASEAN. Meskipun tetap hormat kepada ASEAN, Beijing jadi terlihat lebih percaya diri dalam memainkan potensi peran kepemimpinannya di kawasan.¹⁷

China mulai menerbitkan Buku Putih Pertahanan pada tahun 1998. Sekarang diterbitkan setiap 2 tahun, dokumen ini juga telah berubah dari sekedar eksposisi prinsip-prinsip umum menjadi beberapa penjelasan dasar tentang anggaran pertahanan, program modernisasi, dan isu-isu doktrinal. Meskipun masih jauh dari ideal, setidaknya beberapa langkah sederhana telah dibuat untuk meningkatkan transparansi. China juga mengemukakan "Konsep Keamanan Baru" (NSC) di the ARF Inter-Sectional Support Group (ISG) dalam mengukur tingkat kepercayaan yang dilakukan bersama dengan Filipina di Beijing, pada bulan Maret 1997. NSC menekankan pada kerjasama keamanan, membangun kepercayaan, resolusi damai atas sengketa, dan dialog multilateral.¹⁸ Pada bulan November 2004, China menjadi tuan rumah pertama Konferensi Kebijakan Keamanan ARF di Beijing. Dalam satu dekade, tumbuh rasa saling ketergantungan, dan keberhasilan diplomasi China telah membuat peningkatan yang stabil dengan meningkatnya tingkat kenyamanan antara

¹⁶ Jiang Shuxian and Sheng Lijun, "The Communist Party of China and Political Parties in Southeast Asia," Trends in Southeast Asia Series, Vol. 14, 2005, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, December 2005.

¹⁷ Jürgen Haacke, "Seeking Influence: China's Diplomacy Toward ASEAN after the Asian Crisis," Asian Perspective, Vol. 26, No. 4, 2002, hal. 13-52.

¹⁸ "Summary Report of the ARF ISG on Confidence Building Measures, Beijing, 6-8 March 1997," www.aseansec.org/3605.htm.

China dan ASEAN, yang memungkinkan Beijing untuk memperluas pengaruhnya yang lebih besar di kawasan.¹⁹

2.1.2 Kepentingan China terhadap ASEAN

Di balik retorika alih-alih kerjasama multi-polar, pemerintah China sekarang berbicara tentang integrasi multilateral, dengan slogan "*peaceful rise*" menjadi "*peaceful development*"-tidak lebih dari sekadar kamufase atas kebijakan yang tidak berubah secara mendasar. Ketergantungan terhadap investasi asing langsung, dan meningkatnya ketergantungan dengan struktur ekonomi internasional, dan pada impor sumber daya dan energi, China telah berangsur-angsur berubah menjadi hampir autarkic, ekonomi mandiri dengan ketergantungan ekonomi terbesar di dunia. Hal ini berdampak ganda terhadap kebijakan pemerintah China. Dimana pemerintah harus memastikan kerangka politik sedinamis mungkin untuk mencegah jatuhnya ketergantungan terhadap sistem ekonomi luar, tetapi pemerintah juga bergantung pada sistem ini untuk mempertahankan kekuatan dan legitimasinya sebagai partai yang berkuasa. Efek ganda ini mempengaruhi perilaku China dalam hubungan eksternalnya. China berusaha mencari ruang baru untuk memperluas pasar dan kemitraan baru untuk pengembangan, dengan tujuan ganda: untuk memastikan terus masuknya sumber daya dan modal, dan untuk melindungi kepentingan pasar dalam produksi ekspor.

Namun, kebijakan pemerintah China juga waspada terhadap usaha-usaha "campur tangan luar dalam urusan internal." Kebijakan-kebijakan ini diarahkan pada setiap inisiatif atau kegiatan di mana kepemimpinan melihat potensi ancaman terhadap dominasi, kekuasaan atau legitimasi. China terus-menerus mempertahankan statusnya sebagai negara berkembang, dan mengatakan bahwa sebagai proses dari transformasi, China akan mau menerima bantuan lebih lanjut.

¹⁹ Chairman's Summary of the First ASEAN Regional Forum Security Policy Conference, Beijing, November 4-6, 2004," from the ASEAN Secretariat website; Evan S. Medeiros and M. Taylor Fravel, "China's New Diplomacy," *Foreign Affairs*, Vol. 82, No. 6, November/December 2003, hal. 22-35; Brantly Womack, "China and Southeast Asia: Asymmetry, Leadership and Normalcy," *Pacific Affairs*, Vol. 76, No. 3, Winter 2003-2004, hal. 529-548; Roy, "Southeast Asia and China," hal. 309.

Retorika ini berkorelasi langsung pada kepentingan strategis China terhadap negara-negara mitranya di kawasan Asia dan Afrika.

Secara eksternal, China berusaha keras untuk meningkatkan reputasi dan *image*-nya sebagai agen yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan aktor dalam kerjasama antar negara. Dengan demikian, di bawah premis *non-interference*, China sedang bergerak menuju kerjasama multilateral, yang lebih atau kurang jelas-jelas diikat pada harapan-harapan tentang negara mitranya untuk memajukan tujuan-tujuan termasuk pembangunan ekonomi dan mempertahankan kelanjutan dari sistem politik sendiri. Secara umum taktik China untuk melakukan kerja sama, termasuk dengan menggunakan kebijakan yang lebih lunak (*soft power policy*) adalah untuk memperingatkan dunia tentang konsekuensi dari masalah transnasional yang tidak menguntungkan yang timbul dari dalam China- misalnya dalam sektor lingkungan-tapi pada saat yang sama, China menantang negara-negara mitra untuk ambil bagian dalam memecahkan masalah ini.

Beberapa mendorong peningkatan kerja sama yang erat dengan China dengan tujuan untuk dapat menekan kekhawatiran atas ekspansi imperialis China di Asia Timur. Pemikiran lainnya menunjukkan bahwa pragmatisme tentang China secara negatif dapat mempengaruhi kepentingan negara-negara kecil di kawasan, seperti dalam kasus Myanmar. Tentu saja hal ini akan merusak atau melemahkan upaya ASEAN untuk menciptakan pondasi politik yang satu dengan (misalnya) mendukung kolaborasi bilateral. Oleh karena itu timbul kecurigaan yang mendalam bahwa membangun kerjasama dengan China yang pragmatis ternyata bisa menjadi keputusan tergesa-gesa, misalnya jika krisis di Taiwan berkejolak, hubungan China dengan Amerika Serikat memburuk, pasokan energi terputus, atau stabilitas politik dalam negeri yang membahayakan.

Dengan demikian, dari sudut pandang eksternal, setiap negara pasti akan ragu dengan tidak adanya transparansi pada konsep jangka panjang kebijakan luar negeri dan regional China. Beijing mengumumkan kriteria yang sangat retorik tentang "hidup dan biarkan hidup," keadilan, tanggung jawab aktif, menahan diri dan tidak campur tangan-untuk beberapa nama-adalah sangat bertentangan

terhadap tindakan China yang sewenang-wenang untuk sebagian besar negara-negara di kawasan, kebijakan China saat ini dari selektif membuka atau menutup mata tergantung pada kepentingannya sendiri dan secara mendasar tidak sesuai dengan harapan eksternal.

Perwujudan peran kebijakan regional China yang bermacam-macam, dalam spektrum yang meragukan antara mempertahankan atau mengubah status quo di kawasan. Dalam setiap kasus, untuk setiap konvergensi antara peningkatan kekuatan China dan negara-negara ASEAN terletak pada sistem regional kolektif; kemampuan dalam bernegosiasi dan tanggung jawab yang berkelanjutan.²⁰

Ada beberapa faktor yang menyebabkan China membangun hubungan dengan ASEAN, khususnya dibidang ekonomi, yaitu:

1. Kebijakan reformasi yang dijalankan oleh pemerintah China.
2. Kebijakan China dalam hal berhubungan dengan tetangga secara bersahabat.
3. Kedekatan geografis dan sejarah serta budaya dengan ASEAN.
4. Keterbatasan bahan mentah di China dan kepentingan nasional China yang ingin menggantikan posisi hegemoni dalam perekonomian dengan Jepang.
5. Dan karena orientasi kebijakan ekonomi ASEAN yang memang berkeinginan kuat untuk menjalin hubungan ekonomi dengan China.

Namun faktor yang paling penting adalah perdagangan luar negeri. Perdagangan luar negeri adalah pendorong bagi pembangunan ekonomi China-ASEAN. Oleh karena itu China dan ASEAN berusaha untuk meningkatkan hubungan perdagangan luar negeri diantara mereka sejak memasuki tahun 1990-an. Pola perdagangan China-ASEAN memasuki dimensi baru dimana berkembangnya gejala interdependensi ekonomi membawa dampak pada meningkatnya hubungan ekonomi China-ASEAN. Sejak China resmi menjadi mitra dialog penuh ASEAN pada tahun 1996 dan keanggotaan China dalam ASEAN+3 sejak tahun 1997 semakin mempererat hubungan bilateral China-

²⁰ *Ibid*, Hans J. Giessmann, "ChIndia" and ASEAN: About National Interests, Regional Legitimacy, and Global Challenges, FES Berlin Briefing Paper 7, May 2007, hal, 3-4.

ASEAN yang secara otomatis semakin meningkatkan hubungan ekonomi khususnya perdagangan dan investasi antar kedua pihak.

2.2 Sejarah Hubungan ASEAN Dengan India

India telah menjalin hubungan dekat dengan negara-negara ASEAN sejak masa kemerdekaan dan mulai memperluas pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara selama tahun 1950 dengan mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia dan melibatkan diri dalam krisis Indocina pada 1960-an. India juga menandatangani perjanjian persahabatan dengan Indonesia, Myanmar dan Filipina dan mengkonsolidasikan hubungan bilateral dan hubungan diplomatik dengan mereka. Namun, dengan penandatanganan “Perjanjian Kerjasama Perdamaian dan Persahabatan” antara India-Uni Soviet membuat hubungan antara India dan ASEAN mengalami penurunan.

Persepsi anggota ASEAN terhadap Uni Soviet pada waktu itu tidak terlalu ramah dan penandatanganan perjanjian itu membuat mereka curiga terhadap niat India.²¹ Selanjutnya, di bawah pengaruh Uni Soviet, India mengakui rezim Republik Rakyat Kampuchea yang bersandar di Vietnam pada Juli 1980 dan selama dekade itu, India membangun hubungan politik dan militer yang kuat dengan Vietnam. Ini bertentangan dengan pandangan ASEAN yang mengutuk rezim Kampuchean dan mengakibatkan memburuknya hubungan antara India dan ASEAN.²²

Selama tahun 1980-an, hubungan antara India dan ASEAN mengalami ketidakpastian dan diganggu oleh berbagai perbedaan politik dan diplomatik yang menghasilkan kompromi hubungan ekonomi antara mereka. Namun, dengan runtuhnya Uni Soviet, India mulai mengorientasikan kembali prioritas kebijakan luar negerinya. India memulai *Look East Policy* dan membina kembali hubungan ekonomi dengan Asia Tenggara.²³ ASEAN juga menyadari pentingnya India sebagai perekonomian terbesar ketiga di Asia, sebagai kekuatan regional dan melihat arti

²¹ Mohammad Ayoob, *India and Southeast Asia: Indian Perceptions and Policies*. London: Rutledge, 1990.

²² Zhao Hong, “India’s Changing Relations with ASEAN: From China’s Perspective,” East Asian Institute Working Paper No. 133, October 2006.

²³ Ibid.

penting bagi politik dan ekonomi ASEAN di masa depan. Munculnya pandangan untuk saling melengkapi menyebabkan India diterima sebagai mitra sektoral ASEAN pada awal tahun 1992 dan diangkat menjadi mitra dialog penuh pada Juli 1996.²⁴

Pada tahun 1990-an terjadi kebangkitan regionalisme di Asia Tenggara. Pasca krisis ekonomi akhir 1990-an, terdapat penekanan yang kuat untuk melakukan integrasi ekonomi regional dengan menghasilkan proliferasi berbagai Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) yang melibatkan ASEAN dan negara-negara lainnya di kawasan. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kemunculan India sebagai salah satu aktor yang berpengaruh di kawasan itu, India juga menerapkan kebijakan untuk membentuk hubungan ekonomi dan strategis yang lebih erat dengan ASEAN. Pada KTT ASEAN-India kedua di Bali pada bulan Oktober 2003, India dan ASEAN menandatangani kesepakatan untuk membentuk Kawasan Perdagangan Bebas.

Kehadiran India pada Pertemuan KTT Asia Timur pada Desember 2005 dan dimasukkan dalam Komunitas Asia Timur, telah menjadi bukti terhadap tumbuhnya sinergi di antara mereka dan menunjukkan prospek yang cerah terhadap terwujudnya integrasi yang lebih besar di kawasan di masa yang akan datang.

Peningkatan hubungan India-ASEAN terjadi pada akhir 1990-an dan awal 2000. Pada tahun 1998, Perdana Menteri India, Mr. Atal Bihari Vajpayee bermaksud untuk mempercepat penerapan *Look East Policy* India.²⁵ Konsep tentang 'extended neighborhood' dipopulerkan oleh para pemimpin India seperti I.K. Gujral dan Jaswant Singh.²⁶ Dalam sebuah kuliah di Institut Studi Strategis di Singapura pada tahun 2000, Jawant Singh menjelaskan, parameter keamanan India dengan jelas berfokus pada batas-batas nyaman, meskipun masih banyak dipertanyakan tentang definisi geografis di Asia Selatan.

²⁴ Syed Hamid Albar, "ASEAN-India Partnership: Opportunities and Challenges," *India-ASEAN Partnership in an Era of Globalization*. New Delhi: Research and Information System for the Non-Aligned and Other Developing Countries. 2002.

²⁵ Zhao Hong. *Op.Cit.*

²⁶ Malla VSV Prasad, "Political and Security Cooperation between India and ASEAN," in Kumar, Sen and Mukul Asher (eds.), *India-ASEAN Economic Relations: Meeting the Challenges of Globalization*. Singapore: Institute of Southeast Asian Countries. 2006.

Asia Selatan selalu berada dalam posisi meragukan dalam kerangka untuk menempatkan paradigma keamanan India. Mengingat ukuran, lokasi geografis, hubungan perdagangan dan ZEE, keamanan lingkungan India dan kekhawatiran potensi berkisar dari Teluk Persia ke Selat Malaka di Barat, Selatan dan Timur, Asia Tengah di Northwest, Cina di Timur Laut dan Asia Selatan demikian.²⁷ India sedang berusaha mengembangkan hubungan dengan negara-negara di luar lingkungan terdekatnya, seperti negara di Asia Timur dan Asia Timur Laut dan negara-negara ASEAN.²⁸

Salah satu langkah konkrit pertama yang diambil oleh India adalah pembentukan Kerjasama Proyek Sungai Mekong-Ganga tahun 2000 yang meliputi India dan lima negara ASEAN (termasuk empat anggota baru ASEAN-Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar dan Thailand). India menyadari bahwa kerjasama ekonomi dengan ASEAN akan tergantung pada seberapa cepat negara-negara ASEAN baru bisa menyatu dengan negara ASEAN lainnya dan dimaksudkan untuk menyediakan mereka bantuan secara teknis dan ekonomi.²⁹

Pelembagaan hubungan ASEAN-India Pertama kali terjadi ketika Pertemuan pertama ASEAN-India di Phnom Penh pada tanggal 5 November 2002 dan dianggap sebagai keberhasilan dari penerapan *Look East Policy* India. Keberhasilan ini dianggap sebagai pengakuan atas kemunculan India sebagai *key player* di kawasan Asia Pasifik.³⁰ Terobosan ini muncul setelah sebuah usaha panjang dan melelahkan sebagai bagian dari diplomasi India untuk meyakinkan negara-negara ASEAN untuk menyelenggarakan KTT ASEAN-India yang terpisah. Sentimen ini bergema dalam sebuah artikel di sebuah surat kabar terkemuka India yang menyatakan bahwa “Pertemuan Pertama ASEAN-India di Phnom Penh, Kamboja, langkah maju bagi India untuk bergerak maju dalam mengembangkan kemitraan strategis yang luas dengan negara-negara Asia Tenggara”. Sementara para pemimpin politik India terus-

²⁷ *Ibid*, hal. 270.

²⁸ *Ibid*.

²⁹ Zhao Hong, Op.Cit.

³⁰ Man Mohini Kaul. 20 November 2002. “Time for a Great Leap Eastwards,” *The Indian Express*. <http://www.mea.gov.in/opinion/2002/11/20o03.htm> (diakses pada tanggal 5 April 2010)

menerus berbicara tentang bagaimana mereka akan mengakhiri kemiskinan, para pemimpin di Asia Timur dan Asia Tenggara berbicara tentang bagaimana mereka akan meningkatkan kesejahteraan rakyat mereka.³¹

Ada pengakuan jelas dalam lingkaran strategis politik India akan pentingnya ekonomi ASEAN untuk kepentingan nasional India. Pada Kuliah Tahunan di Singapura pada tahun 2002, Perdana Menteri India Mr. Atal Bihari Vajpayee menyatakan, "kawasan Asia Tenggara adalah salah satu titik fokus kebijakan luar negeri asal India, pilihan strategis untuk kepentingan ekonomi".³² Lokasi kawasan ASEAN yang strategis di antara sebagian besar tempat-tempat penting wilayah di dunia. Dengan masuknya Myanmar kedalam ASEAN, India kini memiliki batas wilayah dengan ASEAN, selain dengan berbagi batas-batas maritim dengan Indonesia, Thailand dan zona ekonomi eksklusif (ZEE) dengan Malaysia.³³

India menganggap ASEAN sebagai inti kawasan Asia Timur dan percaya dalam meletakkan penekanan pada interaksi dengan ASEAN. Dengan kekhawatiran yang mendalam mengenai pengaruh Cina di kawasan, India mengajak ASEAN untuk membina keamanan multilateral di kawasan Asia-Pasifik.³⁴ Pada saat yang sama, seperti yang dijelaskan oleh Hong, "dari perspektif ASEAN dan Jepang, India dianggap sebagai penyeimbang terhadap dominasi China di Asia Tenggara, namun secara publik, India menghindari peran itu."³⁵ Sebenarnya daripada bersaing, India ingin mengembangkan hubungan komplementer dengan China. Ada perasaan bahwa India tidak harus bersaing dengan China, tapi harus mempersiapkan diri untuk menghadapi persaingan yang ketat dan kemungkinan konflik di masa mendatang.³⁶

³¹ G Parthasarathy. "The Gains of Looking East," *The Pioneer*, 21 November 2002. <http://www.mea.gov.in/opinion/2002/11/21o03.htm> (diakses pada tanggal 5 April 2010)

³² AB Vajpayee, "India's Perspectives on ASEAN and the Asia Pacific Region", 9 April 2002. India's Ministry of External Affairs Website, <http://www.mea.gov.in/sshome.htm> (diakses pada tanggal 5 April 2010)

³³ Malla VSV Prasad. *Op.Cit.*

³⁴ Amitabh Mattoo, "ASEAN in India's Foreign Policy," in Frédéric Grare and Amitabh Mattoo (eds.), *India and ASEAN: the politics of India's look east policy*. New Delhi: Manohar. 2001.

³⁵ Zhao Hong. *Op.Cit.* hal. 12.

³⁶ Amitabh Mattoo, *Op.Cit.*

2.2.1 Kepentingan India terhadap ASEAN

Sejak awal dari liberalisasi ekonomi, ekonomi India telah ditandai dengan tingkat pertumbuhan stabil sekitar tujuh persen, tak kurang dari tingkat pertumbuhan di China. Tidak seperti China, bagaimanapun, transformasi ekonomi India belum dipenuhi oleh euforia global yang dramatis seperti kebangkitan China. Alasan yang paling penting untuk fenomena ini adalah kenyataan bahwa India telah menjadi negara demokrasi yang disegani dan pemain global sebelum memulai liberalisasi ekonomi. Karena transformasi menjadi kompetitif, teknologi tinggi ekonomi, pertumbuhan penduduk yang berkelanjutan, dan yang paling baru-baru ini, tergabung sebagai anggota resmi dari "klub nuklir", posisi global India yang semakin menguat tidak muncul dengan begitu saja. Konsekuensi dari proses liberalisasi bisa lebih baik dibandingkan secara global, bukan di kawasan Asia Timur, karena secara kawasan-ketika berbicara tentang kepentingan keamanan India, banyak negara-negara di Asia masih sangat *concern* dengan kepemilikan nuklirnya (bersama dengan Pakistan) dan memicu terjadinya beberapa disintegrasi yang mengarah pada kekerasan dan terorisme.

Strategi "*Look East*" baru, yang telah dilaksanakan sejajar dengan posisi India sebagai satu aktor global, belum secara jelas didefinisikan. Pada kenyataannya, India tidak dinyatakan dalam memproyeksikan kepentingan kekuasaan atau pengaruhnya pada negara di sekitarnya. Harus disadari bahwa posisi geopolitik India- sebagai quasi-pulau di sub-benua - adalah kerugian strategis India pada *setting*-an kelembagaan ASEAN karena posisi India berada di pinggiran, dan tidak termasuk dalam kawasan ASEAN. Aspek lain adalah terkait dengan potensi kekuatan eksplosif konflik sosial di negara yang akan segera memiliki populasi terbesar di bumi. Potensi konflik tidak hanya ada di Kashmir, tetapi sekarang juga tidak kurang dari empat titik masalah lain (provinsi) di daerah timur, dengan kemungkinan akan menyebar ke provinsi yang lain di masa depan.

Masalah ketiga untuk India, tentu saja, adalah China. Meskipun terlihat tanda-tanda kemajuan (yaitu, penyelesaian sengketa perbatasan, peningkatan perdagangan), hubungan India dengan tetangga terbesar itu dianggap sangat

penting, walaupun masih sangat sensitif dan rapuh. India lebih berharap untuk lebih mengkonsolidasikan hubungan, karena India tidak ingin dan tidak akan mampu bersaing dengan China untuk memperebutkan hegemoni di Asia Tenggara. Namun hubungan ini jauh dari harapan untuk menjadi aliansi strategis yang saling menguntungkan bagi kedua negara ini di panggung dunia.

Hasil yang lebih mendesak dari "*Look East*" strategi India adalah akses ke forum multilateral ASEAN dan ASEM. India sangat memperhatikan hal ini, karena India digunakan oleh lembaga ASEAN sebagai penyeimbang China. Tidak seperti China, India menunjukkan minat yang kurang untuk aktif terlibat dalam kerjasama politik. Sejauh menyangkut kerjasama keamanan, India fokus pada keamanan maritim untuk jalur laut di semenanjung Samudera Hindia (yaitu Hormuz dan Malaka).

Perubahan yang paling penting dalam kebijakan regional India adalah kurangnya peranan untuk lebih berbicara di kawasan Selatan atau negara berkembang. India berbicara dan bertindak dalam kapasitas sendiri, mengacu pada kepentingannya sendiri dan memilih peran yang berpusat untuk semua kegiatan. Ironisnya, kebijakan India telah demikian menjadi lebih "China": sedikit mengandalkan nilai, lebih pragmatis dan lebih mengedepankan pencapaian kepentingan. Tentu saja ini mungkin termasuk perilaku yang kurang bertanggung jawab di bidang hubungan internasional pada tahun-tahun yang akan datang. Tidak seperti China, yang telah memilih untuk lebih dekat dan juga kerjasama politik, India menganggap perannya lebih ad-hoc, lebih tergantung pada kepentingan tertentu, lebih di satu bidang. Hal yang paling penting bagi India adalah harapannya untuk pemenuhan pasokan energi dan kebijakan ekspor yang menguntungkan ke pasar berkembang, Asia Tenggara.

Berkenaan dengan pendekatan baru ini, India menghadapi masalah serius. Hubungan ekonomi dengan ASEAN relatif lemah; India bergantung pada peningkatan ekspor (hampir 50 persen per tahun). Anggota ASEAN merasakan tekanan ekspor ini dari India, merasa tidak mendapat balasan yang menjanjikan, begitu juga dengan Kekecewaan tentang kebijakan "ekonomisasi" regional India.

Beberapa ahli khawatir bahwa target India di Asia Tenggara bukan didasarkan pada kepentingan yang nyata, tetapi lebih sekedar untuk mendapatkan posisi yang lebih kuat vis-à-vis China.³⁷

Alasan kepentingan India untuk menjalin kemitraan yang lebih dekat dengan ASEAN disebabkan karena:

1. Pendapatan per kapita ASEAN dua kali lipat dari India dan memiliki peluang pasar yang cukup terbuka.
2. ASEAN memiliki basis sumber daya alam yang kaya.
India melirik kesempatan untuk dapat mengintegrasikan perusahaan multinasionalnya untuk dapat berkembang di ASEAN.
3. Selain itu, negara-negara seperti Malaysia, Singapura dan Thailand menjadi investor utama di India, khususnya dalam kegiatan pembangunan infrastruktur dan modal ventura.

Dengan meningkatnya persaingan, kebutuhan untuk tetap maju dalam era ekonomi global yang berbasis pengetahuan, ASEAN-India harus memperluas dan memperdalam hubungan ekonomi mereka. ASEAN-India harus bekerja sama di bawah Perjanjian Kerangka Komprehensif Kerjasama Ekonomi dan merealisasikan potensi ekonomi mereka di bidang perdagangan barang dan jasa dan investasi secepat mungkin. Dengan demikian, ASEAN dan India dapat meningkatkan daya tarik masing-masing sebagai tujuan FDI dan meningkatkan daya saing mereka sebagai produsen, eksportir dan penyedia layanan di pasar global.

2.3 Posisi China dan India di Asia Tenggara

Sebagian besar Negara di Asia Tenggara mempunyai pandangan yang berbeda terhadap India. Pada satu sisi, citra India diuntungkan dengan wilayah yang tidak terbebani oleh warisan kolonial atau dengan persaingan untuk perebutan pengaruh hegemoni. Di sisi lain, India tidak memainkan peran penting di kawasan Asia Selatan

³⁷ *Ibid*, Hans J. Giessmann, hal, 4-5.

sampai saat ini. Jumlah perdagangan timbal balik yang dapat diabaikan sampai satu dekade yang lalu telah berubah sejak awal pertumbuhan ekonomi India pada akhir 1990-an.

Tidak hanya ASEAN yang memiliki defisit perdagangan luar negeri dengan pertumbuhan India dari tahun ke tahun, tapi kenaikan impor India dari daerah lain di dunia juga telah berkembang lebih cepat daripada peningkatan impor dari Asia Tenggara. Namun, situasi terlihat berbeda dari satu negara ke negara. Program Pengembangan Kapasitas untuk negara-negara CLMV (Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam) dianggap berguna, karena India kontribusi kepada Dana Pembangunan ASEAN dan investasinya ke dalam infrastruktur dari negara-negara CLMV.

Anggota ASEAN mengeluhkan tentang proteksi India terhadap barang-barang impor dari Asia Tenggara. Sementara kisaran tarif impor ASEAN, rata-rata, antara sepuluh dan dua belas persen, India mengenakan tarif hingga 29 persen terhadap barang-barang impor dari Asia Tenggara. Ketidakseimbangan ini telah meletakkan beban yang luar biasa terhadap kinerja ekspor yang sangat bergantung pada usaha BUMN dan juga menjadi sulit karena India telah memperlambat dan menunda perundingan mengenai pelaksanaan pelaksanaan *Free Trade Area* hingga pada tahun 2011. Kenyataan bahwa India telah memperluas perdagangan timbal-balik dengan Myanmar namun kurang terlibat dengan anggota ASEAN lainnya secara umum dianggap sebagai tanda kurangnya prioritas kepentingan India di wilayah ASEAN secara keseluruhan.

Tapi tidak seperti China, yang dianggap oleh ASEAN secara skeptis dengan berbagai harapan, para anggota tidak begitu peduli dengan aktifitas politik yang lebih aktif yang dilakukan oleh India. India tidak dianggap sebagai ancaman, melainkan berpotensi sebagai aktor penyeimbang dan stabilisator.

Kebangkitan China dianggap sebagai kesempatan yang penuh dengan risiko. Semua anggota ASEAN berusaha untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin dari keterbukaan ekonomi China. Di sisi lain, dalam hal keamanan, negara-negara ASEAN sangat ingin pro-aktif memelihara atau memperbaharui hubungan koalisi dengan Amerika Serikat untuk proses destablisasi. Secara simultan, negara-negara

ASEAN berusaha mencoba untuk tidak terjepit dan tidak mau menjadi subjek persaingan bilateral di antara rivalitas China dan India.

Sebenarnya, inti rasional kebijakan ASEAN tidak berada dalam posisi netral melainkan dengan harapan untuk mendapatkan yang terbaik dari hubungan dengan keduanya. Anggota ASEAN melihat China sebagai tantangan, bukan ancaman. China yang paling baru-baru ini menunjukkan kebijakan konstruktif dalam menyelesaikan sengketa wilayah di Laut China Selatan (di atas Kepulauan Spratley) telah mendorong penilaian positif di antara negara anggota ASEAN, meskipun keprihatinan mengenai keberlanjutan ofensif ancaman China hampir tidak memudar. Dalam rangka untuk meminimalkan berbagai keprihatinan ini, bertujuan sebagai langkah pembendungan, ASEAN memperluas kerjasama multilateral dengan China pada level regional dan sub-regional serta memasukkan China ke dalam mekanisme lintas sektoral regional ASEAN.

Dalam analisis kasus-per-kasus, perspektif anggota ASEAN vis-à-vis China tidaklah sejalan, namun lebih banyak didasarkan atas faktor kedekatan geografis dan kepentingan ketergantungan ekonomi. Semakin dekat jarak dan semakin besar ketergantungan ekonomi berarti akan semakin besar harapan ekonomi dan perhatian politik.

Geopolitik dan asimetri strategis menyebabkan sikap yang berbeda untuk pembangunan kerangka kerjasama antara China dengan anggota ASEAN. Misalnya, kebijakan Malaysia dan Indonesia yang banyak dipengaruhi oleh keberadaan mayoritas Muslim. Kedua Negara mempertimbangkan keberadaan China sebagai aktor penyeimbang yang berpotensi untuk mengurangi tekanan dari Amerika Serikat dalam perang melawan teror. Keduanya juga melihat China sebagai pasar dan sebagai mitra untuk investasi, perdagangan dan kerjasama. Mereka mencoba untuk menggunakan kerjasama yang lebih erat untuk melindungi kepentingan mereka urusan internasional. Untuk Filipina dan Singapura, yang tertarik untuk membina hubungan yang stabil dengan China, memilih koalisi militer mereka dengan Amerika Serikat sebagai tameng dari kebijakan keamanan mereka. Peran Amerika Serikat pada

kedua negara ini sangat kuat sebagai penyeimbang dari peningkatan kekuatan China di kawasan.³⁸

Tabel 2.1
Matriks Perbandingan Sejarah Hubungan ASEAN Dengan China-India

China	India
Persahabatan	
1. Indonesia dan Burma pertama kali mengakui kemerdekaan RRC pada tahun 1950 2. Mempertahankan hubungan dekat dengan rezim komunis di Vietnam Utara dan memberikan dukungan yang signifikan atas perlawanan mereka terhadap Perancis dan Amerika Serikat (Tahun 1950-1970)	India telah menjalin hubungan dekat dengan ASEAN sejak masa kemerdekaan dan mulai memperluas pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara selama tahun 1950 dengan mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia dan melibatkan diri dalam krisis Indocina pada tahun 1960-an.
Permusuhan (Ketidak harmonisan)	
Ketidak harmonisan hubungan China dengan negara-negara Asia Tenggara yang non-komunis, karena Beijing mendukung pemberontakan komunis di Asia Tenggara.	Namun mengalami penurunan ketika India menandatangani perjanjian 'Kerjasama Perdamaian dan Persahabatan' dengan Uni Soviet.
Normalisasi	
Kebijakan China ke Asia Tenggara mulai mengalami perubahan penting dalam dua hal: 1. Pada tahun 1980-an, Beijing menghentikan dukungannya terhadap gerakan pemberontakan komunis di kawasan. 2. Pada tahun 1989, mengeluarkan undang-undang tentang kewarganegaraan China terhadap warga negaranya yang tinggal diluar negeri yang butuh pengadopsian kewarganegaraan.	Dengan runtuhnya Uni Soviet, India mulai mengorientasikan kembali prioritas kebijakan luar negerinya. India memulai Look East Policy dan membina kembali hubungan ekonomi dengan Asia Tenggara.

³⁸ *Ibid*, Hans J. Giessmann hal, 5-6.

Kesimpulan

China dan India sedang berusaha untuk memperluas kehadiran strategis dan pengaruh mereka di sekitar sebagai konsekuensi atas kekuatan ekonomi mereka. Kedua negara berusaha mencari keterlibatan yang lebih luas dengan negara-negara lainnya baik secara regional maupun global. Dalam hal ini, perlu dicatat bahwa baik China dan India telah mengambil langkah-langkah penting untuk meningkatkan kerjasama satu sama lain. Kebanyakan dari kepentingan China dan India di Asia Tenggara didorong berdasarkan kepentingan mereka dan berdasarkan prinsip saling menguntungkan dibidang ekonomi.

China menemukan cara yang lebih mudah untuk terlibat dengan ASEAN dibandingkan dengan India. Karena China dipandang dengan ketakutan yang lebih besar di Asia Tenggara dibandingkan dengan India karena berbagai faktor, diantaranya sejarah kekuasaan dan pengaruh China di wilayah ini; *image* negatif yang berkaitan dengan kekuasaan komunisme, dukungan China terhadap pemberontakan komunis di Asia Tenggara dimasa lalu, klaim teritorial dan sengketa dengan negara-negara regional, dan karena ukuran wilayah China yang lebih besar serta kedekatan wilayah dengan kawasan Asia Tenggara.

Dalam bab selanjutnya akan lebih banyak diceritakan tentang bagaimana proses perkembangan kemajuan ekonomi yang dialami oleh China dan India, serta implikasinya terhadap kawasan Asia Tenggara.